

Strategi INA DIGITAL dalam Melaksanakan Amanat Perpres 82/2023

Portal Administrasi Pemerintah Bidang Layanan Aparatur Negara

Farah Fitria Rahmayanti
Direktur Digital Business

Jakarta, 18 Desember 2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2023

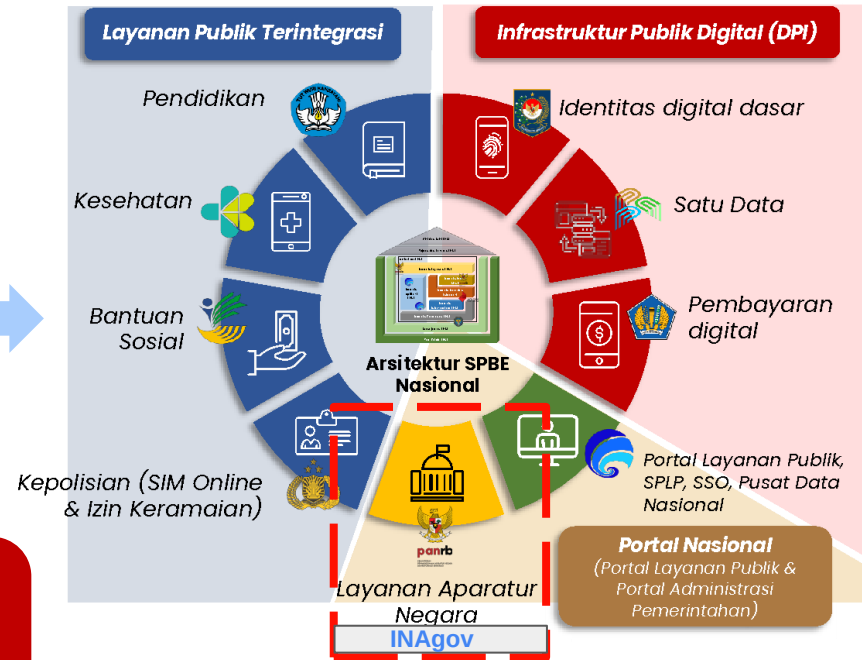
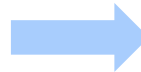
TENTANG

PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETERPADUAN LAYANAN
DIGITAL NASIONAL

SALINAN

18 Des 2023 :
Terbit Perpres
82/2023

Mencakup
Layanan Prioritas
SPBE dari 9 K/L
Penanggung
Jawab



27 Mei 2024 -
Peluncuran INA
Digital sebagai
GovTech
Indonesia:
Penandatanganan
Komitmen
Percepatan

Tambahan 6 K/L

KOMITMEN

PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAI LANGKAH AWAL MENUJU INDONESIA TERINTEGRASI

Bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan korupsi, dan penguatan aspek keamanan siber dan keamanan informasi, perlu melakukan percepatan transformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional, selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2023, kami berkeinginan untuk:

1. mewujudkan percepatan transformasi digital pemerintah melalui koordinasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan Perum Peruri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memajukan keterpaduan layanan digital nasional melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengintegrasikan integrasi, keamanan, dan interoperabilitas, serta memperhalus kebutuhan dan kemudahan pengguna yang berorientasi pada masyarakat (citizen centric), pemanfaatan berbagi pakai data sesuai kebijakan Satu Data Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pelindungan Data Pribadi; dan
3. menyediakan anggaran dan sumber daya pendukung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, guna mengintegrasikan, menginteroperabilitaskan, dan meluncurkan Aplikasi SPBE Prioritas secara terpadu untuk pertama kalinya paling lambat pada akhir triwulan III tahun 2024.

Dengan komitmen ini dibuat sebagai pondasi pemerintahan baru untuk menjalankan dan memperluas agenda transformasi digital pemerintahan, serta menjamin keberlangsungan Layanan SPBE Prioritas yang terpadu.

yang berkeinginan:

1. Menteri PANRB; (Abdullah Anwar Arifin)	8. Menteri Sosial; (Tri Rismaharini)
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas; (Suharsno Mustofa)	9. Menteri Hukum dan HAM; (Yenny H. Ludy)
3. Menteri Dalam Negeri; (Tito Karnawan)	10. Menteri ATR/Kepala BPN (Agus Harimurti Yudhoyono)
4. Menteri Keuangan; (Sri Mulyani Indrawati)	11. Kepala POLRI; (Idrisy Sigit Prabowo)
5. Menteri Kominfo; (Bud Arie Setijadi)	12. Kepala BSSN; (Hima Sibarani)
6. Menteri Dikbud Ristek; (Nadiem Makarim)	13. Direktur Utama BPJS Kesehatan; (Ali Ghulron Mukti)
7. Menteri Kesehatan; (Budi Gunadi Sadikin)	14. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan; (Anggoro Eko Cahyo)
	15. Direktur Eksekutif PMO Prakerja (Denni Pungpa Purbanara)



1. BPJS Ketenagakerjaan
(Layanan Kesejahteraan
Prakerja)



4. PMO Prakerja
(Layanan Prakerja)



2. BPJS Kesehatan
(Layanan BPJS Kesehatan)



5. KemenkumHAM
(Layanan Imigrasi)



3. Kementerian ATR/BPN
(Layanan Pertanahan)



6. BSSN
(*non-layanan)

MENATA FOKUS LAYANAN DIGITAL PRIORITAS DENGAN *DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE* SEBAGAI FONDASI KETERPADUAN

Agenda Prioritas Transformasi Digital Nasional



Pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Okt '24 yang berkaitan dengan **prioritas di bidang Digital**

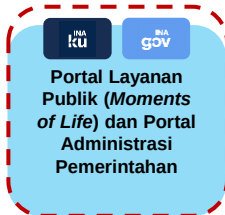


Transformasi Digital untuk ketepatan sasaran Bantuan Sosial dan Subsidi



Transformasi Digital untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dan layanan digital prioritas lainnya yang didukung dengan *backbone* sistem prioritas (DPI) yang terpadu



Wujud lanjutan **Sistem Prioritas** keterpaduan Layanan Digital Nasional

**e-katalog
Pengadaan
Barang dan Jasa
publik**
K/L terkait:

dan K/L terkait lainnya

**Sistem Informasi
Mineral dan
Batubara**
K/L terkait:

dan K/L terkait lainnya

**Distribusi
Bantuan Sosial &
Subsidi**
K/L terkait:

dan K/L terkait lainnya
**Ketepatan Sasaran
Bansos & Subsidi**

**Layanan
Digital Masyarakat
berdasarkan
Moments of Life**



Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



Pengembangan **Digital Public Infrastructure (DPI)** sebagai infrastruktur interoperabilitas



Digital Identity



Data Exchange



Digital Payment



Pasal 3 Ayat 1

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) **menugaskan Perum Peruri** untuk **penyelenggaraan** Aplikasi SPBE Prioritas.

Pasal 3 Ayat 2

- Identifikasi permasalahan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas;
- Pendalaman kebutuhan Pengguna SPBE; dan
- Perancangan Solusi Tepat Guna.

Pasal 3 Ayat 3

- Perencanaan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas;
- Pembangunan dan/ atau pengembangan Aplikasi SPBE Prioritas;
- Pengintegrasian Aplikasi SPBE Prioritas;
- Pengoperasian Aplikasi SPBE Prioritas;
- Keamanan Aplikasi SPBE Prioritas;
- Distribusi dan/atau diseminasi Aplikasi SPBE Prioritas;
- Pemeliharaan Aplikasi SPBE Prioritas; dan/ atau
- Pengelolaan Infrastruktur SPBE yang mendukung Aplikasi SPBE Prioritas.

Dokumen STG



Platform INAgov





CURRENT SITUATION

- ✗ The public must access various complex and duplicated applications.
- ✗ Service processes that are still complex, lengthy, and non-transparent.
- ✗ The need for "KTP photocopy" to access services.
- ✗ Repeated data entry required to access services.



EXPECTED SITUATION

- ✓ 1 portal for various services, with single sign-on (SSO) access.
- ✓ A process that is simple, fast, easy, and transparent (*user-centric*).
- ✓ No need for KTP photocopies. Access with digital identity for personal data security (*Security by design*).
- ✓ One-time data entry for multiple services (*Once-only principle*).

Product : Layanan Terpadu dalam Satu Portal

Berbasis *Citizen Centric*
mengakomodasi perjalanan hidup
manusia (*moments of life*)
dari lahir sampai tutup usia

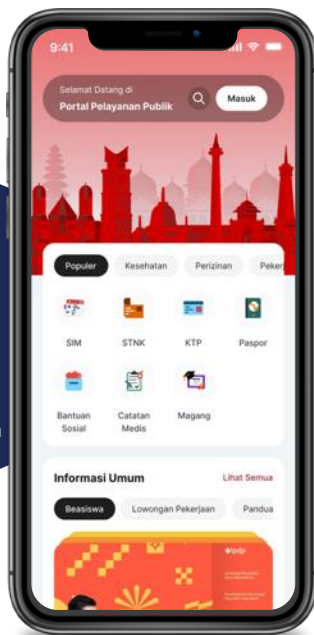
Identitas
Kependudukan
Digital (IKD)



**Single
Sign On**

berbasis data
kependudukan

Keamanan
siber & sandi
data



**Data
Exchange**
(Sistem
Penghubung
Layanan
Pemerintah)

**Tata Kelola
Data
dalam
kerangka
Satu Data
Indonesia**

**Ibu Hamil
Anak-anak**
Gizi -
Persalinan -
Sekolah



Remaja

SIM - Perguruan
Tinggi



Dewasa

Pekerjaan - Tempat
Tinggal - Imigrasi -
Pernikahan -
Perceraian



Lansia

Sakit - Tutup Usia

Inisiasi Awal Layanan Terpadu pada Portal Nasional



Administrasi Kependudukan



Program Indonesia Pintar &
Kartu Indonesia Pintar Kuliah



Antrean RS, Registrasi Dokter
(STR), Sertifikat Vaksin & Imunisasi



Izin Penyelenggaraan Event (Izin
Keramaian), SIM Online, SKCK



Cek Bantuan Sosial



Layanan Aparatur Negara



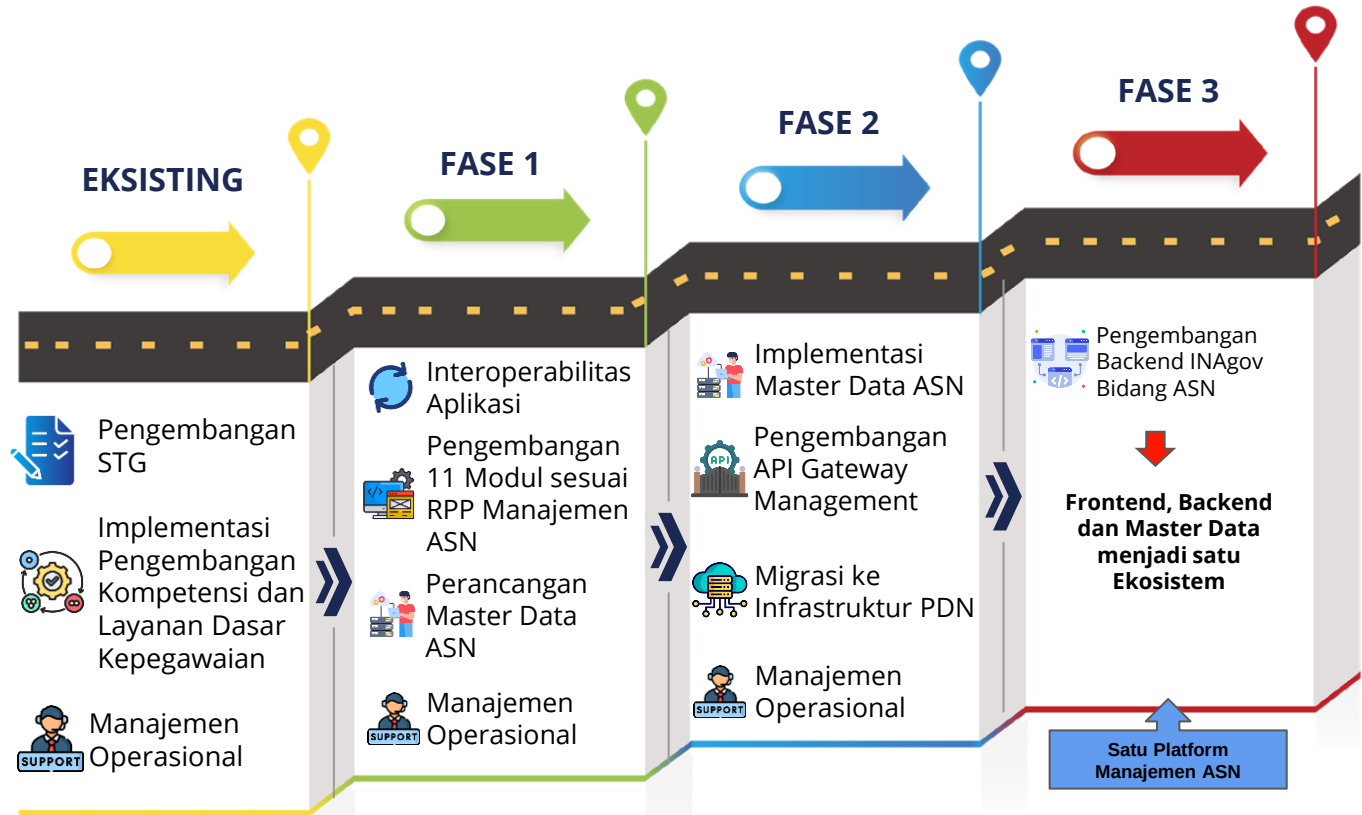
Info Penerima Bantuan /
Pembayaran Digital PNPB

Layanan lainnya yang sudah siap:
Keimigrasian, BPJS, Pertanahan,
Ketenagakerjaan, dll.

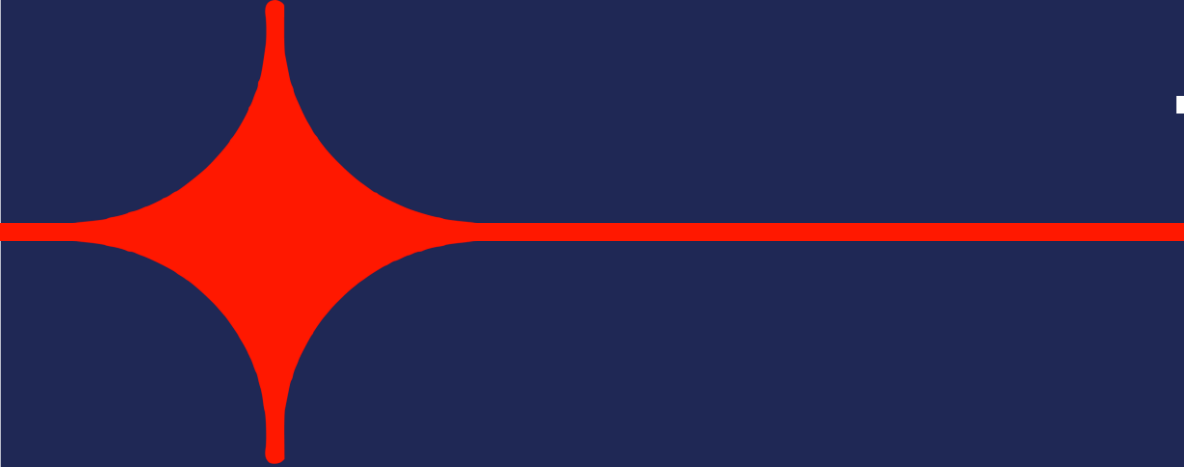




Portal
Administrasi
Pemerintahan
**Bidang Layanan
Aparatur Negara**



*Asumsi RPP Manajemen ASN selesai di Undangkan awal tahun 2025

A red decorative graphic consisting of a central four-pointed star shape with rounded points, from which a horizontal line extends to the right, ending in a small vertical bar.

Terima Kasih